

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Provinsi Jawa Timur ini tentu membantu para Eks Pekerja Seks untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam pelaksanaan pemberdayaan ini terjadi koneksitas antara petugas, klien, juga lembaga-lembaga lain yang dapat di uraikan menggunakan empat unsur pembentuk teori Modal Sosial. Adapun uraian kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kewajiban dan Ekspektasi.

Dalam praktiknya, keberadaan klien dan petugas saling memiliki ekpektasi dan kewajiban. Para klien memiliki ekpektasi setelah dari UPT bisa mekakukan aktifitas atau bekerja dalam bidang jasa sesuai dengan bidang pemberdayaan yang mereka ikuti. Petugas juga memiliki ekspektasi kepada klien agar mudah diatur, tertib, bisa mengembangkan skill, sehingga bebas dari lingkaran pekerja seks. Sedangkan kewajiban petugas ialah wajib menaati peraturan daerah dan mendengarkan arahan dari Kepala. Mereka juga membuat program-program wajib. Begitupun kewajiban klien, harus mentaati perintah dari petugas untuk melakukan dan menyelesaikan program-program UPT.

2. Relasi Wewenang.

Keberadaan pemerintah memiliki peran yang besar, namun mereka tidaklah mungkin menjangkau langsung pada rumpun bawah atau lapangan. Itu sebabnya perlu dibentuk penyambung tangan dan lidah melalui Perda yang kemudian memunculkan relasi yang

baru, bahkan antar lembaga. Bertemunya beberapa lembaga (UPT. RSBKW.-Puskesmas-Psikologi_dll) bermula dari pembentukan atau perencanaan konsep pembinaan dan pemberdayaan pada klien. Mereka juga akan saling menjaga relasi ini untuk tetap bisa melaksanakan tugas dengan optimal sebagai wujud tanggung jawab masing-masing aktor pemberdayaan, khususnya tanggung jawab petugas UPT. Para petugas UPT memiliki kewenangan untuk menyukseskan pemberdayaan pada klien. Bidang-bidang tersebut antara lain ialah empat bidang pemberdayaan, salon, tataboga, jahit, dan rias. Bidang-bidang tersebut sesuai dengan modal yang dimiliki oleh klien (sifat fisik mereka sebagai wanita).

3. Saluran Informasi.

Bentuk modal sosial yang penting adalah potensi informasi yang melekat pada relasi-relasi sosial. Dalam pemberdayaan UPT. RSBKW., para petugas diharuskan menjalankan pemberdayaan yang selaras dengan kebutuhan klien. Itu sebabnya mereka melakukan wawancara guna memiliki data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan klien, bisa berbentuk konseling ataupun wawancara.

4. Norma dan Sanksi Efektif.

Realitas masyarakat yang memiliki norma sosial dan norma agama, serta dipegangnya secara erat norma-norma tersebut membuat UPT. RSBKW. juga memberikan bimbingan sosial dan keagamaan kepada klien. Ini bertujuan untuk mempersiapkan para klien saat hidup di masyarakat. Ada dua bentuk norma yang diterapkan dalam pemberdayaan ini, yang pertama ialah norma yang telah terbentuk seperti pada umumnya atau aktivitas yang sudah terbentuk dari luar seperti kerja bakti, pengajian, dan lain sebagainya. Kedua ialah norma yang sengaja dibentuk di dalam UPT., praktik dari norma yang kedua ini antara

lain adanya program sholat tahajud secara berjamaah, kemudian dzikir jamai, dan juga pembagian jadwal piket.

Keempat unsur modal sosial di atas merupakan uraian terkait proses pemberdayaan yang dilakukan lembaga (petugas) kepada Klien. Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh UPT. RSBKW. bisa dikatakan sebagai proses pemberdayaan yang cukup efektif, bnetuk konkrit kefektifan ini seperti langkah-langah yang mereka lakukan yaitu melalui proses interaksi terlebih dahulu, proses pemberdayaan yang mereka lakukan juga nyaaman untuk dijalani para Klien. Meski begitu namun ada beberapa catatan yang harus penulis sampaikan pada sub bab saran.

B. Saran

Dalam sub bab saran, ada dua bentuk saran yang harus peneliti sampaikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Saran Akademis

Sebagai fungsi dari keberadaan kampus yaitu bermanfaat untuk masyarakat tanpa pandang bulu, realitas Pekerja Seks seperti ini tentu layak untuk ditindak lanjuti agar ada peningkatan dalam aktivitas pemberdayaan, juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan keilmuan serta peran mahasiswa untuk masyarakat yang lebih baik.

2. Saran Praktis

3. Secara praktis, peneliti mendapatkan dua catatan ketika penelitian ini dilakukan. Pertama, pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi ini tentu mengeluarkan banyak biaya, agar biaya tersebut tepat sasaran maka bentuk program yang dijalankan seharusnya lebih tertata dan dijalankan secara maksimal. Mulai dari akar masalah Pekerja Seks itu

sendiri, seperti bentuk perdagangan dengan penyitaan identitas, kemudian sebab-sebab mereka masuk dalam dunia Pekerja Seks, keberlangsungan hidup mereka setelah masuk dalam lingkaran Pekerja Seks, itu semua adalah beberapa ruang yang harus ditangani secara serius untuk menyukkseskan proyek besarnya, yaitu memutus rantai Pekerja Seks yang terjadi pada setiap generasi. Kedua, untuk memperlancar kegiatan pembinaan terhadap Klien, perlu adanya penambahan tenaga pekerja sosial yang profesional, karena pekerja sosial yang ada di UPT. RSBKW. terlihat sangat terbatas untuk menjalankan fungsi yang lebih maksimal. Ringkasanya, kedua hal tersebut apabila dijalankan secara serius maka rantai Pekerja Seks akan lebih cepat terputus. Tidak lagi dijadikan sebagai program yang terus menerus dilaksanakan tanpa ada hasil secara tuntas.